

**Formulasi Lingkaran
Mandala Kebijakan Luar
Negeri Indonesia Pasca
Jokowi**

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (2) 1-41
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track:
Submitted: August 9, 2025
Accepted: September 19, 2025
Available On-line: November 17, 2025

Laode Muhammad Fathun

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

Vania Zahra Nathania

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2210412014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Satryo Pringgo Sejati

Universitas Papua
s.sejati@unipa.ac.id

Jamal Din Aulia

Universitas Bangka Belitung
jamaldin-aulia@ubb.ac.id

Della Nurlaela

Universitas Malikussaleh
dellanurlaela@unimal.ac.id

Abstract

This paper aims to explain the formulation of the *Mandala* in Indonesia's foreign policy during the post-Joko Widodo era, particularly under President Prabowo Subianto. *Mandala* is a political system that originated during the Canagya Kingdom under the Maurya Dynasty around 320 SM. It describes concentric circles of power that serve as a governance model in decision-making and foreign relations, where each state's behavior is determined by its capacity: great powers tend to act confrontationally (*Vigraha*), middle powers act accommodatively (*Asana*), and small states behave affirmatively (*Samsraya*). Every state aspires to reach the central position known as *Raja Mandala*, representing the highest level of legitimacy, balance, and strategic capability. The problem statement of this study stems from the shifting interpretation of Indonesia's "free and active" foreign policy principle, which varies across leadership

Laode Muhamad Fathun, et al	Formulasi Lingkaran Mandala Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Jokowi
-----------------------------------	---

eras. Differences in character, situational context, and strategic calculation have produced diverse policy formulations. Hence, this study analyzes how Indonesia's *Mandala* structure of foreign policy is reinterpreted under Prabowo's leadership, characterized by a strategic, tactical, and hierarchical approach. Using a qualitative method through literature review, this research finds that Indonesia's foreign policy is strongly influenced by domestic, external, and leadership factors. Under Prabowo Subianto, Indonesia's diplomacy becomes more proactive and progressive by combining *soft power* and *hard power*. The *Mandala* formulation in this era reflects Indonesia's effort to balance its perception as a great power with its reality as a *middle power*, ensuring a foreign policy that remains contextual, constructive, and nationally oriented.

Keywords: Formulation, Foreign Policy, Mandala, Prabowo Subianto

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang itu diantaranya adalah: a) menjadi negara dengan basis kekuatan maritim baik dari sumber daya ekonomi, politik, hukum, militer dan sosial, b) menjadi negara dengan identitas unik dengan keistimewaan dalam politik internasional dan komunikasi internasional, c) menjadi negara yang menuju superpower dengan basis kombinasi postur, kultur dan struktur wilayah laut. Namun tidak bisa juga dipungkiri akan tantangan yang akan hadapi seperti: a) kepemilikan anggaran besar untuk pengelolaan wilayah yang besar, b) menjadi wilayah primadona untuk menjadi kawan atau lawan dalam konteks nasional, regional dan internasional, c) serta menjadi negara akan rawan ancaman keamanan tradisional dan non tradisional. Oleh

sebab itulah sebagai negara yang besar harus memiliki kebijakan pertahanan yang diformulasikan berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Sehingga, diplomasi bentuk ini sangat penting bagi Indonesia untuk tetap bertahan.

Namun, saat ini tantangan Indonesia cukup menarik baik di level nasional, Regional dan internasional. Misalnya di level nasional masih banyak persoalan anggaran, koordinasi, kemampuan sumber daya, dan lain-lain (Susanto, 2015). Konsekuensinya pada kemampuan bertahan tadi yang melemah. Di sisi lainya adalah munculnya pemain baru dalam level pertahanan dan keamanan di wilayah regional IORA, ASEAN dan yang terbaru adalah Indo Pasifik yang Indonesia menjadi motor dalam desain ini. India saat ini membangun kebijakan dengan basis kebijakan luar negeri dari Chanakya ke Modi, kemudian Tiongkok dengan mendesain kebijakan dari Mao ke Xin Jin Ping dan Indonesia sendiri membangun kebijakan dari Soekarno ke Jokowi. Tiga negara ini membangun kekuatan Indo-Pasifik yang mampu menggeser posisi Amerika di level teratas. Tiongkok dan India yang makin melesat menjadi tantangan bagi Amerika untuk menjadi lawan berat kedepan. Disisi lainnya Indonesia harus mengambil posisi pusat. Simetri dan kardinal untuk memanfaatkan rivalitas tersebut.

Saat ini kebijakan Poros Maritim sedang digaungkan oleh Indonesia namun sampai saat ini belum jelas orientasi dari kebijakan ini. Penulis mengatakan bahwa kebijakan Poros Maritim adalah sebuah doktrin politik yang berkonsekuensi pada kebijakan pertahanan dengan nuansa geopolitik dan doktrin ekonomi yang bernuansa geoekonomi serta doktrin sosial yang bernuansa nusantara. Apabila ini dikelola dengan baik maka akan sangat baik untuk sebuah negara Mandala. Penulis mengatakan bahwa kebijakan pertahanan dengan anggaran 400 triliun lebih tidak sangat cukup untuk membangun Indonesia sebagai negara poros. Poros itu adalah nuansa klaim dan klaim adalah status quo. Sehingga kalau bicara status quo harus memiliki portofolio yang banyak untuk menguasai. Poros adalah penaklukan bukan hanya secara psikologis tetapi teknis. Selain itu, dari sisi kepemimpinan kosmos Menteri pertahanan berbasis pada militer dengan latar belakang Kopasus yang merupakan salah satu pasukan elit dunia (Fathun, 2024).

Tulisan ini akan membahas implementasi kebijakan luar negeri dalam lingkaran Mandala. Argumentasi Mandala adalah kemampuan suatu negara dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Mandala adalah sebuah sistem yang diadopsi dari India Kautilya yang kemudian fenomena ini juga berpengaruh ke Indonesia dengan munculnya kerajaan Hindu dan Budha. Faktanya dua kerajaan besar seperti

Majapahit, Sriwijaya adalah peristiwa masa lalu dalam tradisi wawasan Nusantara yang mampu menunjukkan kekuasaan Mandala dalam bertahan. Majapahit dan Sriwijaya bukan hanya berkuasa dalam kekuatan darat namun mampu melancong hingga ke negeri seberang dengan kekuatan maritimnya. Mandala memiliki tiga argumen utama yaitu titik pusat yang bermakna bahwa fondasi dasar dari negara adalah kemampuan kepala negaranya dalam mendesain kebijakan. Istilah ini kemudian disebut dengan dewa raja. Dalam prespektif ini raja adalah kekuatan kosmik yang merupakan representasi Tuhan dalam kekuasaan. Kemudian, simetri yang diartikan dengan negara harus bersifat fleksibel mampu memahami situasi dalam arsitektur politik internasional yang terus berubah. Dan terakhir adalah kardinal yang dimaknai dengan kemampuan negara mencari desain-desain strategi untuk mengamankan negaranya (Effendi, 2019). Secara singkat Mandala berbicara tentang kepemimpinan, ideasional rasional dan strategi teknis. Oleh sebab itulah kebijakan luar negeri Indonesia harus dikelola berdasarkan tradisi Nusantara dengan kultur, postur dan struktur yang baik. Sebab dengan hal tersebut menunjukkan Indonesia sebagai negara yang mampu membangun pertahanan dengan identitasnya.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, penelitian ini menyoroti bahwa formulasi kebijakan luar negeri Indonesia di setiap

era kepemimpinan presiden selalu mengalami perubahan seiring dengan perbedaan nilai, prinsip, serta karakter masing-masing pemimpin. Pergeseran ini menyebabkan pola interpretasi terhadap prinsip *politik luar negeri bebas aktif* menjadi tidak seragam dan sering kali bergantung pada preferensi kepemimpinan yang sedang berkuasa. Akibatnya, Indonesia belum memiliki *white paper* atau model kebijakan luar negeri yang baku dan berkelanjutan yang dapat menjadi pedoman lintas pemerintahan.

Permasalahan ini berhubungan erat dengan tata kelola birokrasi, proses artikulasi kepentingan nasional, serta kapasitas teknokratis di lingkungan pengambil kebijakan. Ketika interpretasi dan orientasi kebijakan terus berubah, konsekuensinya adalah ketidakkonsistenan dalam formulasi strategi luar negeri yang berdampak pada posisi dan persepsi Indonesia di tataran internasional. Dalam konteks inilah, penelitian ini memandang perlunya suatu pendekatan konseptual untuk membaca ulang arah kebijakan luar negeri Indonesia melalui model *Mandala*, terutama di era Prabowo Subianto.

Pada masa pemerintahan Prabowo, hanya dua elemen dari *Astacita* yang berkaitan langsung dengan kebijakan luar negeri, yaitu poin kedua mengenai keamanan dan regional, serta poin kelima mengenai kedaulatan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

kebijakan luar negeri Indonesia cenderung diarahkan untuk memperkuat stabilitas keamanan dan kemandirian ekonomi, tetapi tetap perlu dijaga agar tidak hanya bersifat perseptual sebagai negara besar, melainkan juga sejalan dengan kapasitas dan identitas Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan fenomena kebijakan luar negeri Indonesia secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek historis, konseptual, dan kontekstual. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang mencakup sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan luar negeri, serta publikasi akademik yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan, mengelompokkan, dan membandingkan berbagai sumber kemudian dikaitkan dengan kerangka teori Mandala sebagai alat analisis utama. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara sistematis dinamika formulasi kebijakan luar negeri Indonesia serta relevansinya terhadap kondisi lingkungan strategis global yang terus berkembang.

Hasil

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri akan selalu berubah sesuai kebutuhan dan situasi Negara. Kebijakan politik luar negeri adalah adalah studi tentang perilaku dan praktik hubungan antara aktor yang berbeda, terutama negara, di sistem internasional. Diplomasi, intelijen, negosiasi perdagangan, dan pertukaran budaya semua merupakan bagian dari substansi kebijakan luar negeri antar internasional aktor. Dalam menganalisis kebijakan politik luar negeri dibagi menjadi sejauh mana pengaruh faktor struktural (kendala yang diberlakukan oleh sistem internasional) dan agensi manusia (peran pilihan individu dalam membentuk sistem internasional) dan ketika menganalisis keputusan kebijakan politik luar negeri dan lingkungan pengambilan keputusan. Oleh sebab itulah kebijakan luar negeri adalah kisah yang selalu berubah tentang bagaimana negara, institusi dan orang-orang saling terlibat dalam internasional yang dinamis (Alden, 2017).

Fitriani dan Vido Chandra Panduwinata menyampaikan gagasan pilar kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi menyangkut point 1) keamanan dan perdamaian, 2) diplomasi ekonomi, 3) perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar Negeri, 4) kerjasama ASEAN dan 5) diplomasi maritim (Panduwinata, 2018)

Selain itu, Kementerian Luar Negeri sebagai institusi memiliki delapan sasaran strategis a) diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat. b) kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat, c) peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat, d) diplomasi ekonomi yang kuat, e) perlindungan terhadap WNI dan BHI di luar negeri f) kebijakan luar negeri yang berkualitas g) dukungan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang berkualitas h) dan meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kemlu (Panduwinata, 2018).

Kebijakan politik luar negeri dirumuskan dengan proses intelektual, prosedural dan teknis. Hal ini untuk menghasilkan kepentingan nasional yang sesuai dengan target setiap negara. Demikian juga yang dilakukan oleh Indonesia, Upaya Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya inilah kemudian dimaknai dengan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif. Dalam implementasi Bebas Aktif itu Indonesia memilih diplomasi sebagai media implementasinya. Diplomasi yang dimaksudkan adalah diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, reaktif, luwes dan mandiri sebagai sebuah prinsip sesuai amanat UUD 1945 (UU/37/1999). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nicolson bahwa seni dari hubungan internasional adalah melalui diplomasi. Lebih lanjut Wight bahwa diplomasi adalah soko guru hubungan antar Negara dan Cohen bahwa diplomasi adalah ruang mesin hubungan internasional. (Carlsnaes, 2013). Dengan

demikian, penulis menyimpulkan bahwa setiap aktor hubungan internasional yang dalam hal ini adalah Negara dalam menyikapi situasi yang selalu berubah maka negara tersebut selalu mendesain kebijakan luar negerinya yang diformulasikan melalui diplomasi.

Mandala dalam Formulasi Kebijakan Luar Negeri

Mandala sebagai sebuah refleksi pemikiran dalam hubungan internasional lahir dari gagasan Chanakya dalam Arthashastra Kautilya (298-322 SM). Buku ini sangat populer sebagai buku klasik dalam perumusan model kebijakan luar negeri. Mandala sendiri sederhananya diartikan sebagai sebuah lingkungan strategis atau lingkaran konsentris yang bersifat kosmos dan kadang disebut juga pemerintahan galaksi. Mandala berkembang sebagai sebuah pemikiran non barat dalam hubungan internasional yang barangkali masih memiliki irisan pemikiran dengan tradisi barat seperti Hobbesian. Chanakya menceritakan penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Maurya yang sampai hingga ke Afghanistan. Penaklukan tersebut sebagai upaya eksistensi raja dalam menjaga dan memanfaatkan kekuasaannya. Chanakya selalu menyampaikan bahwa sebagai seorang raja atau pemimpin yang menjadi representasi kebenaran maka seharusnya

tidak memiliki keraguan dalam memutuskan persahabatan atau aliansi dengan suatu Negara bahkan melakukan ekspansi. Lebih lanjut Chanakya menyampaikan bahwa Negara yang kuat harus bersiap untuk berperang dan memilih merangkul atau perdamaian ketika Negara tersebut tidak memiliki kemampuan. Selain itu, Chanakya menyampaikan bahwa dalam lingkaran konsentris Mandala tidak semua tetangga adalah sahabat tetapi juga ada yang menjadi musuh. Sehingga, muncul argumen dasar teori Mandala bahwa tetanggamu adalah sahabatmu dan juga bisa menjadi musuhmu. Dengan demikian Mandala adalah sebuah teori dengan pertimbangan kalkulasi geografis. Sehingga Negara mampu memetakan dirinya sebagai makhluk rasional yang bisa saja di ekspansi jika tidak melakukan ekspansi. Konteks ini mirip dengan pemikiran realis klasik dalam hubungan internasional (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).

Beberapa peneliti berargumen bahwa teori Mandala berkembang dengan penuh perdebatan. Mandala sebagai sebuah teori yang lahir dari region India merupakan Teori NonBarat yang memiliki kemiripan asumsi dasar dengan kombinasi pemikiran Trio paradigma hubungan internasional realisme Hobbesian, Machiavelli, Mearsheimer, Morgenthau. Kemudian Liberalisme Kant, John Locke serta pemikiran Marxisme dari Karl Marx. Realisme selalu berargumen tentang real politik, kalkulasi, ekspansi, militeristik, kekuasaan dan penaklukan.

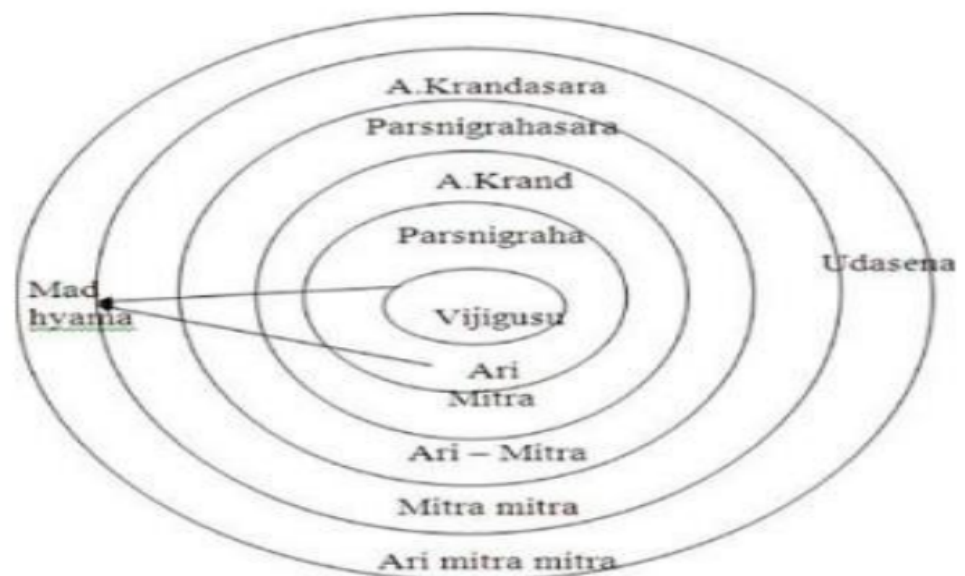
Sama halnya liberal yang selalu berpikir tentang kesejahteraan, individualisme, dan kebebasan serta moralitas dan Marxism yang selalu berpikir kesejahteraan ekonomi dan keadilan kelas sosial. Namun teori Mandala lebih kompleks dari itu karena menggabungkan dua hal yakni tradisi Hindu (Realpolitik) dan tradisi Budish (moral politik). Mandala mengembangkan pemikiran dengan tiga fondasi yakni Kekuasaan, kesejahteraan dan ketertiban. Selain itu Mandala juga menjadikan filosofi Samkhya, yoga dan lokayata dalam tradisi hindu budha (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).

Teori merumuskan enam fondasi formulasi kebijakan luar negeri dan diplomasi yang akan dikeluarkan oleh Negara dalam situasi yang berbeda. Adapun enam istilah tersebut adalah a) **Sandhi** yang dimaknai dengan sebagai bentuk kebijakan untuk terlibat dalam perjanjian aliansi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan serta memperkuat kekuatan untuk mengalahkan lawan, **Vigraha** merupakan kebijakan konfrontatif yang bisa dilakukan oleh Negara yang kuat. Kebijakan ini sebagai bentuk penunjukan kekuatan diantara penguasa, **Asana** merupakan kebijakan bersikap netral ketika negara tersebut memiliki status negara yang sama, **Yana** adalah kebijakan rasional Negara untuk memutuskan berperang. Hal ini menyangkut kalkulasi kekuasaan dan kekuatan. Logistik dan bala tentara, **Samsraya** merupakan kebijakan yang meminta perlindungan kepada

Laode Muhamad Fathun, et al	Formulasi Lingkaran Mandala Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Jokowi
-----------------------------------	---

Negara yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi agar tidak mudah diekspansi. Hal ini biasanya dilakukan oleh Negara kecil dan **Dvaidhibhava** adalah kebijakan yang dirumuskan untuk meminta perlindungan damai dari raja tertentu agar bisa memperoleh kekuatan untuk bisa bermusuhan dengan dengan raja lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa dari enam pola kebijakan luar negeri di atas setidaknya menunjukkan empat hal yakni Negara kuat (*great power*) yakni **Sandhi** dan **Vigraha**, kemudian Negara netral atau *middle power* yakni **Asana**, Negara lemah (*less power*) atau **Samsraya** dan negara bermuka dua atau *raison the state* serta **Dvaidhibhava** dan Negara *deliberative state* atau **Yana** (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).

Berikut adalah formulasi kebijakan luar negeri dan diplomasi dalam konteks teori Mandala:



Seperti terlihat pada Gambar 1, inti teori Mandala terdiri dari Calon penakluk, di pusat mandala. (Vijigisha) 2. Musuh yang wilayahnya berbatasan dengan calon penakluk, yaitu tetangga yang bermusuhan. 3. Sekutu yang wilayahnya terletak tepat di luar tetangga yang bermusuhan. 4. Sekutu musuh yang merupakan tetangga dari sekutu yang dimenangkan. 5. Sekutu yang jauh secara teritorial. (Vijigishu) 6. Sekutu dari sekutu musuh yang juga jauh secara teritori. 7. Bagian belakang calon penakluk, yaitu musuh belakang 8. Teman belakang 9. Teman dari musuh belakang 10. Teman teman adalah teman belakang 11. Raja / negara netral tetangga baik calon penakluk dan / atau musuhnya tetapi lebih kuat dari keduanya. 12. Raja sangat

acuh tak acuh terhadap semua raja / negara lain tetapi lebih kuat dari calon penakluk, musuhnya dan raja / negara netral (Mishra, 2012).

Berdasarkan kajian diatas bisa disimpulkan bahwa Mandala teori adalah teori pendekatan geografi yang mempengaruhi lahirnya kebijakan luar negeri dan diplomasi. Teori ini lahir sebagai formulasi kekhawatiran lingkungan strategisnya yang bisa saja selalu berubah. Itu artinya kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi teman. Dan yang berbahaya adalah lawan berpura-pura menjadi teman. Karena pada dasarnya tidak ada teman yang abadi, yang abadi hanya kepentingan. Sehingga, tidak ada yang membuat Negara bermusuhan satu sama lain tetapi kepentingan pribadi lah yang membuat itu terjadi.

Selain itu, kalau Mandala berkembang dengan nuansa realisme politik. Ada empat alasan kenapa kemudian Teori NonBarat (TNB) perlu dikembangkan a) di wilayah region selain Eropa dan Amerika banyak pemikir yang bisa dijadikan fondasi lahirnya TNB sebut saja soekarno, Tzun Zuu, Kim Jong Un, Deng Xiaoping, Mahatma Gandhi yang bernuansa Asia b) setiap pemimpin itu memiliki karakter kebijakan luar negeri dan diplomasi yang berbeda dengan belahan bumi lainnya. Mereka memiliki karakter masing-masing yang bisa dikembangkan dalam membangun teori c) relevansi data kadang tidak membantu kekuatan analisis.

Dan d) pendekatan TNB bisa menjadi alternatif dalam menjawab persoalan Hubungan Internasional berdasarkan regionalism. Jadi seharusnya teori –teori yang berkembang adalah regionalism dan pemikiran berdasarkan isu itu ada. Empat poin ini dikembangkan dari karya Acharya dan Buzan pada tahun 2010 tentang NonWestern Theory of International Relations (Buzan, 2010). Di buku yang sama menuliskan pula Mandala sebagai teori dari India yang disebut dengan Politeia. Demikian halnya juga penulis buku Deepshikha Shahi berjudul Kautilya and NonWestern IR Theory tahun 2019 yang berasal dari India sepertinya sepakat bahwa Kautilya memiliki nuansa teoritik seperti realism dan teori-teori lain dengan nama yang berbeda. Namun sepertinya memiliki asumsi yang sama. Dalam perspektif Posmodernis menyampaikan bahwa pengetahuan itu adalah kekuasaan. Sehingga dengan memberikan atau mendoktrin teori sama saja telah menguasai pemikiran orang. Dan menguasai pemikiran artinya menyepakati, melegitimasi kebenaran.

Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma kualitatif dengan bentuk eksplorasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, hasil diskusi, internet dan sumber lainya yang relevan. Penelitian ini berbentuk studi kasus untuk melakukan analisis eksploratif tentang formulasi gata kebijakan luar negeri Indonesia

pasca Jokowi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data proses treading untuk mencari sumber data yang valid dalam menjelaskan fokus penelitian.

Diskusi dan Analisis

Lingkaran Mandala Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Jokowi

Lebih lanjut, Tunas (1965) menjelaskan kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi berkelanjutan antara aktor dan lingkungan mereka. Untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, mereka memperhitungkan konteks internasional. Distribusi kekuatan antar negara dan pengaruh para pemangku kepentingan transnasional dan organisasi antar pemerintah secara parsial menentukan kebijakan luar negeri. Pemerintah yang mengadopsi kebijakan politik luar negeri memandang sistem internasional melalui filter mereka sendiri, yang mungkin budaya, organisasi atau kognitif. Karena itu, untuk memahami dan menjelaskan kebijakan luar negeri, itu juga penting untuk mempelajari dinamika domestik negara bagian dan proses pengambilan keputusan (Morin, 2018).

Menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia sebagai formulasi kebijakan luar negeri Indonesia tentunya memiliki fondasi berbeda sebagai Negara dengan status middle power. Analisis pertama adalah

ketika di Nusantara di era kerajaan Majapahit dengan karakter Hindu Budha maka fondasi karakter Mandala masih dominan. Itu artinya pola kebijakan yang dibangun kerajaan bersifat ekspansionis atau realisme ofensif. Hal ini tidak bisa juga dipungkiri karena situasi kerajaan sedang ingin menguasai dan mencari wilayah jajahan. Hegemoni Majapahit hingga wilayah Asia Tenggara lainnya merupakan bukti eksistensi kepemimpinan kala itu. Tentunya pemaknaan Mandala sebagai wilayah konsentris kosmos akan berpengaruh terhadap pola penaklukan Majapahit. Kenapa ini penting karena merupakan upaya mengimplementasikan kekuasaan yang dimiliki. Dalam perspektif Jawa (Anderson, 2006) menyampaikan bahwa a) kekuasaan adalah ketergantungan timbal balik pada sesuatu. Setiap hal akan memiliki kekuasaan karena kekuasaan adalah dari diri benda itu sendiri. Artinya kekuasaan adalah entitas yang independen sehingga kekuasaan itu berasal dari diri sendiri b) kekuasaan itu homogen, karena kekuasaan adalah diri sendiri yang berdiri sendiri. Kekuasaan adalah moral itu sendiri dan bukan sebuah abstraksi seperti pemikiran barat dan c) kekuasaan adalah hanya bisa terpecah tidak terakumulasi. Itu artinya ketika pusat Mandala memiliki kekuatan super maka di tempat lainnya memiliki sedikit kekuatan. Karena tidak ada yang bisa menandingi Rajamandala (Ali, 1996) (Effendi, 2019).

Pemikiran Jawa ini merupakan antitesis dari pemikiran barat tentang kekuasaan. Sehingga disimpulkan Mandala sebagai pusat galaksi dan karena berbeda dengan sistem Westphalia. Dari pola ini bisa dimaknai bahwa pola kebijakan luar negeri sangat konfrontatif. Makanya Chaanakya berpesan Raja jangan sampai ragu dalam memutuskan perang atau bersahabat. Karena Negara yang lemah adalah dia yang tidak memiliki kekuatan. Raja sebagai pusat kebenaran yang memiliki tongkat adalah bentuk legitimasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Itu artinya pola diplomasi masih bersifat *hard style* atau *red style* yang cenderung kompetitif.

Dalam tradisi Bugis ada tiga pola ketika memaknai musuh yaitu, senjata lisan, senjata mengontrol kemaluan dan mengontrol badik. Itu artinya dalam tradisi Bugis ini lisan adalah representasi kata yang dikeluarkan itu artinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Permainan kata-kata adalah kualitas kekuasaan verbal yang bisa menaklukan dalam bentuk doktrin. Kemudian mengontrol kemaluan artinya sebuah maskulinitas, kejantanan, keperkasaan. Kemaluan adalah identitas rasa malu yang direpresentasikan dengan Siri Na Pacce artinya pentingnya harga diri. Setelah itu Badik adalah representasi instrument alat yang digunakan untuk menaklukan ketika kata tidak bisa menyatukan. Badik adalah alat untuk kekuasaan menunjukan kekuatan dan keperkasaan. Badik yang keluar pantang

kiranya jika tidak terjadi pertumpahan darah. Lebih lanjut, itu artinya sejalan dengan filosofi ketika layar sudah dikembangkan pantang kembali ketepi. Pemaknaannya adalah konsistensi akan tujuan. Oleh sebab itu model kekuatan dan kekuasaan ini sebagai warisan Nusantara yang menjadi dasar legitimasi politik dan pemerintahan. Kedatuan adalah menjadi salah satu bukti tersebut dan pola pemerintahan dari barat merubah itu sebagai bentuk kolonialisme.

Menurut penulis jika dianalisis melalui teori Mandala bisa terlihat jelas bahwa ketika Soekarno memimpin Indonesia lebih relevan menggunakan kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan diplomasi yang *red style*. Atau **Sandhi** dan **Vigraha** dalam istilah Mandala. Konsep Negara pada saat itu bukan great dalam konteks kekuatan tetapi kepemimpinan. Itu artinya Soekarno sebagai pemimpin tidak pernah ragu dalam merumuskan kebijakan persahabatan dan konfrontasi. Sekalipun memang kekuatan Indonesia tidak sebesar para kolonialis tetapi motivasi dan semangat merdeka membuat Indonesia menang. Apalagi Soekarno lahir dalam tradisi Jawa sentris sehingga pola kekuasaan Jawa selalu dimaknai oleh Soekarno. Karena kekuasaan itu ada dalam diri bukan terabstraksi. Dengan demikian kualitas memimpin adalah kunci motivasi.

Ketika di era Soeharto Indonesia sepertinya bergeser pada tataran kebijakan orientasi ekonomi. Artinya kolonialisme yang

dihadapi bukan lagi berbicara politik dan pengakuan tetapi kapitalisme demokrasi sebagai bentuk kolonial. Fakta ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Penanaman Modal Asing, dimana investasi masuk secara besar-besaran di Indonesia. Soeharto lebih relevan dengan kebijakan luar negeri yang akomodatif dalam istilah Mandala **Dvaidhibhava** dimana Negara lebih condong ke barat untuk meminta perlindungan dan bantuan ekonomi agar bisa bertarung dengan Negara lainnya dalam kontestasi ekonomi global. Faktanya Indonesia kala ini bisa sampai swasembada pangan dan peningkatan ekonomi terbesar kedua setelah China dengan indeks ekonomi 6 persen. Setelah itu, era Habibie, (transisi), Gusdur dan Megawati masih konsisten dengan bebas aktif. Menurut penulis ketiga pemimpin ini menggunakan kebijakan luar negeri yang sifatnya korektif. Dan masing-masing pemimpin berhitung kalkulatif berdasarkan situasi yang dihadapi. Sehingga ini relevan dengan istilah Mandala Yana atau *deliberative state*. Pola diplomasi dan negosiasinya pun adalah dengan purple style atau menyesuaikan situasi. Komparasi paling menarik adalah Yudhoyono dan Jokowi yang sama-sama dua periode kepemimpinan. Berikut adalah pola perbandinganya:

Reset Yudhoyono			Reset Widodo		
Berorientasi keluar (An Outward riented)			Berorientasi ke dalam (An Inward looking)		
Pandangan dunia global (Global worldview)			Pandangan dunia Indo-Pasifik (A pan Indo Pasific worldview)		

Laode Muhamad Fathun, et al	Formulasi Lingkaran Mandala Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Jokowi
-----------------------------------	---

Proyeksi demokratis (Democratic projection)	Proyeksi Maritim (Maritime projection)
Proyeksi kekuatan lunak (Soft power projection)	Proyeksi kekuatan keras (Hard power projection)
Aktivisme multilateral (Multilateralism activism)	Bilateralisme (Bilateralism)
Normatif (Normative)	Pragmatis dan transaksional (Pragmatic and transactional)
Pendekatan liberal- institusional (A liberal- institutional approach)	Pandangan realis yang berorientasi pada kepentingan (An interest driven realist worldview)
Awal diplomasi ekonomi (Beginning of economic diplomacy)	Diplomasi ekonomi sebagai kunci instrumen kebijakan luar negeri (Economic diplomacy as key of foreign policy instrument)
Keseimbangan kepentingan (Balance of interest)	Keseimbangan kepentingan (Balance of interest)
Ekuilateralisme (Equilateralism)	Ekuilateralisme (Equilateralism)
Proyeksi kekuatan secara minimal (Minimal force projection)	Proyeksi kekuatan yang lebih tegas (Assertive force projection)
Fokus ASEAN Plus (ASEAN Plus focus)	Penekanan terhadap ASEAN (De – emphasis of ASEAN)
Diplomasi middle power (Middle power diplomacy)	Negara besar (great power) approach

Tabel 1: Perbandingan Pola Kepemimpinan Yudhoyono dan Jokowi

(Shekhar, 2018)

Meneliti kedua pemimpin sepertinya memang masih menggunakan pola yang sama yaitu Negara dengan basis *middle power*. Diplomasi. Indonesia sebagai Negara berbasis *middle power* harus mampu membuktikan setiap target yang menjadi doktrin. Pada dasarnya Negara *middle power* adalah Negara yang mengambil posisi pragmatis. Menurut Swielande menawarkan definisi tentang middle power, menurutnya Negara *middle power* untuk cenderung menghindari etnosentrisitas barat. Dia mengidentifikasi lima

karakteristik kekuatan menengah, yaitu kapasitas mereka, konsep diri, status, dampak regional dan dampak sistemik. Thies dan Sari, mengatakan Indonesia memenuhi syarat sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di bawah presiden Soeharto, Megawati, Yudhoyono dan Jokowi, tetapi tidak di bawah presiden Soekarno, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Kemudian Dewi Fortuna Anwar menyimpulkan bahawa ada tiga model diplomasi Indonesia misalnya di Indo-Pasifik yaitu sebagai katalisator (pembuat proposal), sebagai fasilitator (pengawal program diplomatik dan sebagai manajer (penggagas aksi). Dewi Fortuna Anwar juga mengatakan bahawa diplomasi Indonesia lebih cenderung menggunakan tradisi Kantian daripada Hobbesian dan Lockean. (Anwar, 2020). Konsekuensi sebagai Negara *middle power* inilah menjadikan diplomasi sebagai metode rasional dalam implementasi politik luar negeri Indonesia.

Negara *middle power* dalam istilah Mandala berarti sama dengan Yana artinya selalu mengambil posisi strategis netral dan sentral. Kedua pemimpin memiliki karakter yang sama menerapkan *blue style* namun Yudhoyono lebih globalis dan Jokowi lebih bilateralis. Yudhono selalu aktif dalam panggung global. Menurut Fortuna Anwar kedua pemimpin ini memiliki identitas yang berbeda dimana Yudhoyono adalah mantan tentara dan Jokowi mantan pebisnis. Sehingga orientasinya politik dan ekonomi sebagai dominan. Yudhoyono lebih

fokus pada citra politik dan Jokowi citra ekonomi. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi seperti Forum Dewan tidak tetap keamanan PBB, pasukan perdamaian ketua ASEAN, IORA, APEC dan beberapa organisasi lain. Yudhoyono juga aktif dalam memberikan pidato di forum global sebagai bentuk eksistensi Indonesia. Jokowi sendiri lebih fokus pada pertemuan bilateral. Jokowi lebih intens dengan mitra Negara dari pada multilateral. Namun mau tidak mau konsep ini akan bisa berubah tergantung situasi dan karakter Negara Indonesia apakah bisa menjadi *big power* kedepannya.

Jokowi saat ini aktif merumuskan kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai bentuk internasionalisasi model kebijakan geopolitik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berwawasan Nusantara. Penulis kemudian, menyimpulkan bahwa kebijakan ini dibangun atas dasar peristiwa rasional dari pembisik Jokowi pada saat itu. Pembisik yang dominan adalah Rizal Sukma yang mendesain kebijakan ini dengan tiga argumentasi yaitu a) kebijakan PMD adalah lahir karena identitas Indonesia sebagai Negara kepulauan, b) kebijakan PMD lahir karena realitas geografis, geoekonomi dan *geopolitics* yang dimana Indonesia sangat bergantung pada realitas ekonomi kelautan dan ekonomi maritim di dua samudra serta c) PMD adalah gagasan konkrit strategi paket kebijakan Indonesia dalam tantangan sebagai Negara maritim. Lebih lanjut, Darmansjah Djumala mengatakan bahwa PMD

memiliki tiga dimensi yakni a) hukum dimana Indonesia sebagai Negara kepulauan, b) dimensi keamanan dimana Indonesia menjadi salah satu Negara yang rawan akan ancaman keamanan tradisional dan non tradisional serta dimensi ekonomi, dimana Indonesia berhak untuk mengelola ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, (Rosydin, 2019). Oleh sebab itulah kebijakan PMD sangat potensial kelola Indonesia jika Indonesia memiliki kemampuan ekonomi dan politik serta keamanan dalam mengurus 17.000 pulau lebih dari Sabang sampai merauke.

Selain itu, saat ini telah bergeming peran aktif Indonesia di kawasan Indo- Pasifik dengan *konsep Indonesia s perspectives For ASEAN Outlook on Indo Pacific* yang disampaikan oleh Kepala BPPK Siswo Pramono yang didiskusikan dengan sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri yang melibatkan akademisi dan praktisi. Indo -Pasifik yang dimaksudkan disini adalah pendekatan geografis di belahan kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indo Pasifik bukan singkatan dari Indonesia Pasifik namun memperluas jangkauan pendekatan politik samudera. Indo -Pasifik menjadi tempat tinggal bagi 3/5 populasi dunia dengan GDP 52 triliun USD, sehingga membuka peluang kerjasama internasional dan regional yang komprehensif (Shekhar, 2018) (Anwar, 2020).

Lebih lanjut, yang lebih spesifik tentang Indo-Pasifik dalam domain diplomasi Indonesia bahwa pada KTT ke 32 ASEAN yang merupakan dialog Kerjasama Indo-Pasifik di Jakarta pada 20 Maret 2019. Dialog tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri, wakil menteri dan pejabat senior dari 18 anggota *East Asian Summit* Wilayah Indo-Pasifik. Ada tiga tujuan utama dari kerjasama: (1) untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran; (2) ke alamat tantangan keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional; dan (3) untuk mempromosikan kerjasama ekonomi. Tiga bidang kerja sama konkrit diajukan: kerjasama maritim; infrastruktur dan konektivitas; dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga meluncurkan inisiatif nasional untuk mengadakan (Anwar, 2020). Dengan demikian, upaya Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan bukti kongkrit Indonesia untuk Berjaya dalam konteks kekuatan masa lalu atau Nusantara. Indonesia berharap merumuskan kebijakan dan diplomasi yang berbasis Negara kepulauan Nusantara. Ada tiga domainnya yaitu perlindungan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan. Asertifnya China terhadap Indonesia di laut Natuna Utara dibalas dengan tegas oleh Indonesia untuk mengajak Negara-negara ASEAN menolak klaim itu. Kebijakan China yang melanggar kedaulatan Indonesia baik 2019 dan 2020 adalah ketika pengakuan Negara tersebut kepada kedaulatan Indonesia dan

kedaulatan hukum internasional. Oleh sebab itulah, jika upaya tersebut adalah bentuk upaya kolonial maka Indonesia harus menolak tegas bersama komunitas ASEAN (Fathun, 2023).

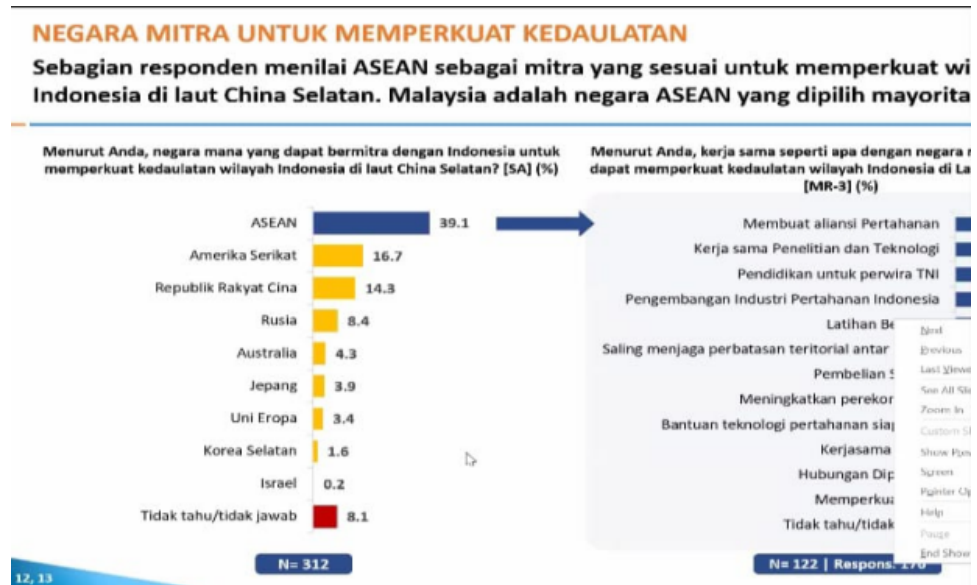
Kemudian, jika menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia Pasca Jokowi yakni terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia ke 8 periode 2024-2029. Arah kebijakan luar negeri Indonesia berpotensi akan melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Jokowi dengan desain dan orientasi berbeda. Mengapa ini bisa terjadi a) Prabowo dalam setiap kampanyenya selalu membangun *tagline* keberlanjutan b) Jokowi adalah Maestro dan creator Pasangan Jokowi Gibran pada Pilpres 2024 c) Gibran adalah Putra Jokowi yang meneruskan kepemimpinan Jokowi dan Program yang dibuat tidak terlalu jauh dengan desain Jokowi, namun sepertinya ada modifikasi.

Salah satu isu yang sangat menarik adalah kebijakan luar negeri Indonesia di bidang Politik dan keamanan. Tantangan Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan ini tentunya bukan hal yang mudah. Tantangan itu diantaranya adalah masalah kemampuan anggaran, kualitas militer, kelembagaan, dan eksistensi politik Sulistyaningtyas, 2015). Sebagai Negara dengan basis *middle power* katalisator dimana Indonesia selalu menginisiasi program kebijakan yang strategis untuk keamanan kawasan. Salah satu bukti konkritnya adalah ketika

Indonesia mengajukan *Code of Conduct* di kawasan ASEAN dalam mengatasi asertifnya China di laut China Selatan. Lebih lanjut Indonesia juga tetap mengawal program tersebut untuk selalu menjadi fasilitator dan mediator untuk Negara-negara kawasan ASEAN untuk lebih rasional menanggapi China dengan negosiasi yang inklusif. Kemudian sebagai manajer Indonesia juga selalu mengawasi program tersebut termasuk menolak keras klaim sepihak China terkait *nine dash line* yang berkonflik dengan sejumlah Negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina. Konsekuensi ini akan menghasilkan konflik kawasan yang akan membuat stabilitas ASEAN terganggu. Salah satu upaya Indonesia adalah membuat grup Indo – Pasifik sebagai kerjasama kawasan agar lebih transparan, stabilan kerjasama yang inklusif (Tenre, 2024).

Berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas kedaulatan dalam bidang politik dan keamanan adalah dengan mencari mitra strategis baik di Kawasan ASEAN maupun melalui hubungan bilateral. Berikut ini adalah hasil survei:

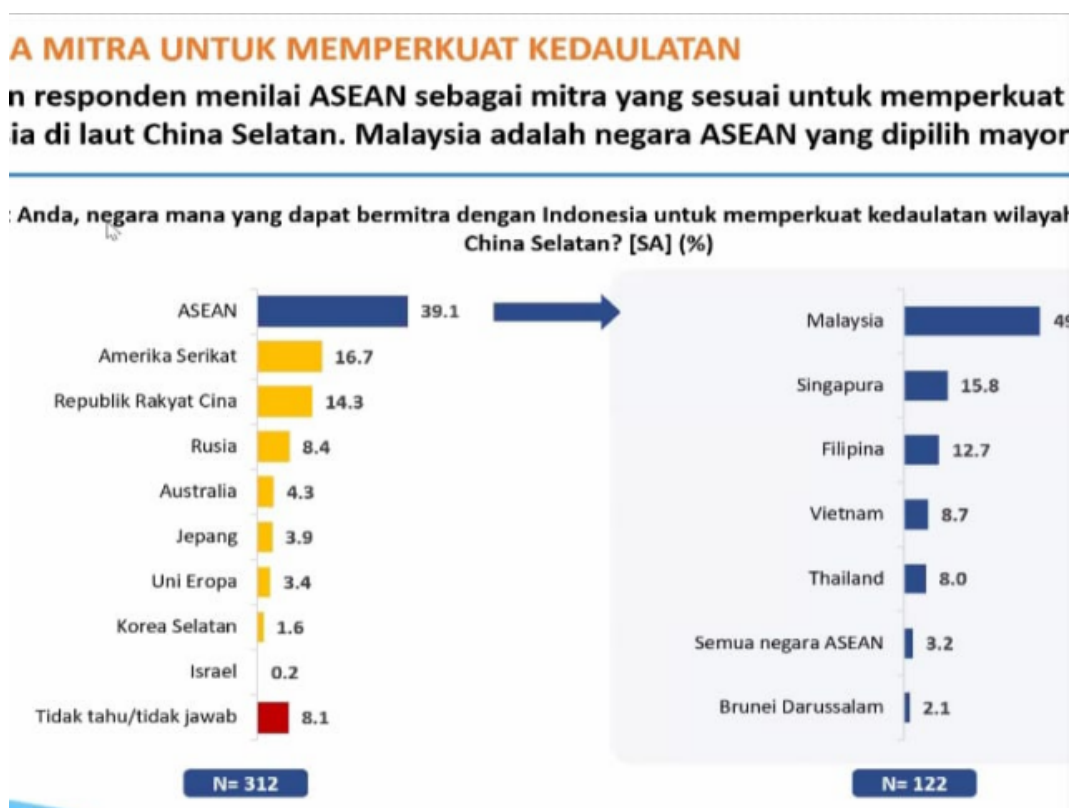
Figure 1. 1



Pada Figure tersebut menunjukkan perlunya membangun relasi dengan negara Kawasan ASEAN khususnya Malaysia. Menurut penulis mengapa ini penting karena a) kedua negara adalah pendiri ASEAN yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas Kawasan ASEAN. Apalagi kedua negara juga aktif dalam berbagai forum bidang politik dan keamanan dalam Kawasan regional seperti ASEAN Regional Forum, AIOP, Indian Ocean Rim Associations, ASEAN Political Security serta menjadi bagian dalam terbentuknya Code of Conduct untuk keamanan Laut China Selatan b) kedua negara adalah mitra strategis dan bertetangga sehingga dari sisi kultur, struktur dan postur juga tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga kolaborasi dan sinergi akan memungkinkan menjadi balancer dalam menjaga stabilitas Kawasan c) memiliki rangkaian Nasib yang sama , sebab menjadi bagian dari klaim sepihak dari China. Dengan demikian

kedua negara tentunya memiliki visi yang sama untuk mengembalikan Marwah hukum laut agar menjadi patokan dalam pengambilan Keputusan kebijakan luar negeri.

Figure 1.2 Mitra Strategis Indonesia dalam menjaga potensi Ancaman di Laut China Selatan



Hasil survei di atas menunjukkan bahwa untuk menjaga stabilitas kawasan khususnya potensi ancaman di laut China Selatan maka Indonesia harus berkolaborasi dengan ASEAN dan Amerika Serikat. Namun hasil survei menunjukkan bahwa pilihan logis dan rasional adalah dengan membangun aliansi pertahanan dengan negara - negara

ASEAN. Sedangkan Amerika Serikat menjadi mitra strategis untuk membeli alutsista sebagai alat pertahanan dan keamanan. Mengapa aliansi harus dengan ASEAN karena 1) kawasan ASEAN adalah Kawasan yang paling stabil di dunia. Dengan terbentuknya ASEAN menjadi instrumen, public opinion dan aktor yang selalu aktif dalam menyuarakan perdamaian Kawasan melalui kerjasama regional. Hal ini sudah terjadi di ASEAN Regional Forum, ASEAN Political Security, Indo Pasifik dan kerjasama strategis lainnya 2) Negara anggota ASEAN adalah negara-negara yang multi perspektif dalam melakukan kerjasama karena tidak semua negara memiliki mitra yang sama. Sehingga jika membutuhkan bantuan bisa saja didapatkan dari mitra-mitra masing-masing negara tersebut yang berbeda 3) Kawasan ASEAN adalah Kawasan yang secara kultural, postural dan structural memiliki kemiripan. Sehingga dari sisi kebijakan tidak terlalu jauh berbeda. Dan 4) ASEAN selalu memiliki visi yang sama dalam berbagai bidang atau dikenal dengan ASEAN Way. Dari sinilah kemudian ASEAN mampu menjadi organisasi regional yang bisa menjadi aktor dan media komunikasi bagi negara anggotanya dan mitra strategis lainnya untuk saling berkolaborasi. Misalnya ASEAN + 3, Asean European Meeting, Asean European Connectivity dan sejumlah kolaborasi lainnya.

Kemudian dari sisi personal Prabowo dalam mengambil Keputusan kebijakan luar negeri, dari tinjauan lingkaran Mandala, menurut penulis akan melakukan modifikasi dan kombinasi antara beberapa karakter lingkaran Mandala. Dengan latar belakang Prabowo sebagai militer tradisional maka penulis menilai bahwa Prabowo berpotensi akan menciptakan kebijakan luar negeri dengan Logika **Sandhi** yang berupaya keras untuk menjalin kerjasama dan aliansi untuk menjaga stabilitas kedaulatan. Hal ini sudah dilakukan dengan menjalin kerjasama di berbagai kerjasama regional ASEAN. Jika Indonesia benar-benar terancam dan China tetap konsisten dengan kebijakan sepihaknya maka kebijakan logika **Vigraha**, **Yana** dan **Samsraya** bermitra dengan Amerika untuk menekan asertifnya China. Mengapa dengan Amerika, sebab hanya Amerika Serikat yang bisa menjadi balancer di Kawasan. Hal ini didasarkan pada kapasitas dan kualitas kekuatan militer Amerika serikat yang ada di posisi pertama dengan nilai 80 lebih dan China dengan nilai 70 lebih. Data dari Lowy institute ini menunjukkan bahwa perimbangan kekuatan dan kekuasaan hanyalah milik kedua negara tersebut. Dan posisi Indonesia hanyalah meminta perlindungan kepada Amerika. Karena selama ini Amerika tidak pernah mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun China dalam berbagai situasi selalu menjadi negara yang mengganggu kedaulatan Indonesia dan Kawasan ASEAN. Dengan demikian, pertimbangan logis

kebijakan luar negeri Indonesia harus diperhitungkan factor internal, eksternal dan individual serta structural agar tidak merugikan. Alex Mintz (2010) menyampaikan kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan rasional untung dan rugi namun tidak melupakan pertimbangan kognisi psikologi. Oleh sebab itulah Indonesia sebagai negara Merdeka memiliki rasionalitas dalam berinteraksi. Sesuai dengan karakter politik luar negeri yang menggunakan diplomasi, maka Indonesia harus tetap konsisten menjaga stabilitas dengan cara persuasi dan diplomasi. Agar tidak menimbulkan kerugian finansial. Apalagi berdasarkan data Lowy Institute 2023 menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kualitas diplomasi terbaik yang menempati posisi pertama. Dengan data tersebut maka penting kiranya Indonesia tidak emosional dan rasional saja dalam mengambil kebijakan. Apalagi pemimpinnya memiliki latar belakang militer.

Problem statement dari artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan dan interpretasi terkait prinsip bebas-aktif. Hal ini disebabkan oleh situasi, posisi, nilai, dan prinsip yang dianut oleh Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh karakter pemimpinnya. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan luar negeri muncul dalam situasi yang berbeda: berbeda mitra, berbeda kepentingan, berbeda instrumen, berbeda struktur birokrasi, serta kondisi yang menuntut pengambil

kebijakan untuk menentukan langkah yang paling menguntungkan tanpa merugikan kepentingan nasional. Selain itu, kepentingan nasional Indonesia harus dicapai dengan cara-cara yang progresif dan diplomatis, karena kebijakan luar negeri Indonesia selalu diambil melalui pendekatan yang konstruktif.

Dalam konteks Mandala, kebijakan luar negeri Indonesia lebih identik dengan negara middle power yang cenderung berupaya mengembangkan kebijakan luar negeri yang bersifat khazanah, khas negara berkekuatan menengah. Namun tentu saja, dari sisi aktivitas, hal ini bisa berbeda antara satu pemimpin dan pemimpin lainnya. Perbedaan tersebut dapat menjadi nilai positif karena bisa dipersepsikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kolaboratif, atau sebaliknya, konfrontatif, yang berpotensi menimbulkan resistensi dari negara-negara mitra strategisnya. Oleh karena itu, karakter kebijakan luar negeri Indonesia dari sisi Mandala selalu berbeda di setiap era. Mandala pada masa Soekarno cenderung konfrontatif (Vigraha), sementara pada masa lainnya berubah. Dalam konteks kebijakan luar negeri era Prabowo, pola tersebut tampak lebih proaktif dan progresif.

Kebijakan luar negeri Indonesia pada era ini berupaya meyakinkan dunia melalui karakter Prabowo Subianto sebagai seorang

militer, yang berasal dari lingkungan strategis pertahanan. Hal ini membuat kecenderungan persepsi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mencerminkan karakter negara besar—namun baru pada tataran persepsi, belum sepenuhnya pada kesiapan dan kapasitas negara itu sendiri. Oleh sebab itu, persepsi ini dalam konteks Mandala harus disesuaikan dengan realitas karakter dan kemampuan negara. Secara korporat, meskipun Indonesia berpikir dan berperilaku sebagai negara besar, tetap harus mempersiapkan diri sebagai negara besar dalam arti sesungguhnya: dengan kemajuan ekonomi, militer, kepemimpinan, dan teknologi. Jika hanya sebatas persepsi, maka hal itu akan berhenti pada tataran gagasan.

Walaupun cara Prabowo Subianto dalam mengartikulasikan kepentingan nasional sudah tergolong progresif dan proaktif, tetap terdapat potensi implikasi besar apabila terjadi konflik terbuka atau dinamika yang menuntut kekuatan hard power. Jika kesiapan di lapangan belum seimbang dengan visi besar tersebut, Indonesia akan kesulitan menghadapi kebijakan konfrontatif yang didasari gagasan sebagai negara besar. Oleh sebab itu, antara gagasan ideal dan realitas faktual negara harus sejalan.

Kebijakan luar negeri Indonesia perlu bersifat proaktif dan terukur dalam setiap langkah progresifnya agar setiap kepentingan

nasional dapat dicapai secara realistis. Pemilihan figur-figur strategis di sekitar Prabowo yang mampu menerjemahkan dinamika lingkungan internasional akan membantu dalam mengartikulasikan kepentingan nasional. Sebagai negara middle power, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan situasi yang berkembang.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus terus bersifat kolaboratif, dengan menekankan ide-ide konstruktif tanpa menciptakan dinamika konfrontatif. Meskipun hal ini tidak menimbulkan konflik terbuka, gaya diplomasi yang terlalu agresif dapat memicu persepsi negara lain bahwa Indonesia adalah negara besar yang siap berkonfrontasi ketika gagasannya ditolak. Oleh karena itu, daripada menanggung risiko yang besar, strategi yang lebih aman dan kontekstual adalah bersikap akomodatif, konstruktif, dan terkendali dalam menciptakan kebijakan luar negeri.

Kesimpulannya, kebijakan luar negeri Indonesia harus didasarkan pada identitas korporat yang dimiliki. Identitas tersebut harus diterjemahkan secara konstruktif agar tidak berhenti sebagai gagasan tanpa tindakan konkret. Tindakan konkret yang tidak proporsional justru bisa berimplikasi negatif terhadap kepentingan nasional. Berdasarkan data yang ada, kemampuan militer Indonesia masih jauh di bawah negara-negara besar. Karena doktrin pertahanan

Indonesia bersifat non-aliansi, maka strategi yang paling relevan adalah tetap kolaboratif dan akomodatif, khususnya dalam konteks kerja sama ASEAN.

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo secara formulasi Mandala seharusnya menciptakan gagasan yang netral, konstruktif, dan tidak memaksakan daya paksa. Masih banyak negara lain dengan gagasan yang berpotensi berseberangan dengan Indonesia, dan jika hal itu berujung pada konflik, tentu akan berdampak negatif pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri harus dikonstruksikan sesuai dengan kapasitas riil di lapangan agar Indonesia tidak dipersepsikan sebagai negara pemaksa. Indonesia perlu menempatkan diri sebagai negara middle power yang mampu menciptakan perlindungan konstruktif terhadap kepentingan nasional.

Persepsi anarkis yang muncul di era Prabowo hanyalah persepsi konfrontatif tanpa kesiapan nyata di lapangan, sehingga secara substansi Indonesia masih lebih tepat dikategorikan sebagai middle power. Kebijakan luar negeri yang hanya didasarkan pada persepsi sebagai negara besar belum kontekstual dengan realitas. Maka, salah satu orientasi utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks lingkaran Mandala harus bersinergi dengan pengembangan kapasitas keamanan nasional. Konsep Minimum Essential Force sudah tidak

relevan lagi mengingat luasnya geopolitik Indonesia yang perlu diamankan.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu: (1) meningkatkan kapasitas dan kualitas militernya, (2) memperbesar anggaran pertahanan dan modernisasi alutsista, (3) mempercepat transfer teknologi untuk menjaga keamanan wilayah, dan (4) memperkuat kolaborasi dan partisipasi dalam kerja sama internasional berbasis pertahanan, khususnya dengan membangun koalisi pertahanan di kawasan ASEAN. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan geopolitik yang dinamis.

Dengan mengadopsi formula ini, formulasi Mandala kebijakan luar negeri Indonesia ke depan berpotensi bergeser dari sifat khazanah menuju Vigraha, yakni negara yang tidak hanya berpikir besar, tetapi juga memiliki kemampuan besar. Dahulu Indonesia dikenal sebagai negara negosiator dan katalisator gerakan non-blok; kini Indonesia perlu menghidupkan kembali semangat itu dengan kapasitas militer, pertahanan, dan diplomasi yang proaktif.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri adalah formulasi Tindakan eksternal negara yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional dan kognisi. Pertimbangan itu dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal

dan individual. Arah kebijakan luar negeri Indonesia di era pasca Jokowi sepertinya masih akan meneruskan sejumlah kebijakan yang didesain oleh Jokowi. Namun kebijakan pasca Jokowi yang diperankan oleh Prabowo akan mengalami modifikasi. Hal ini didasarkan pada pengalaman individu yang berbeda dan kalkulasi yang berbeda. Dalam konteks itulah kemudian peran Indonesia dalam menjaga stabilitas khususnya di Kawasan Laut China Selatan masih akan memodifikasi strategi khususnya diplomasi.

Jika dilihat dari tradisi lingkaran Mandala maka modifikasi dan kreasi yang akan digunakan Prabowo akan menciptakan formulasi kebijakan luar negeri yang mengkombinasikan kekuatan keras dan kekuatan lunak. Sebab dengan latar belakang militer membuat Prabowo sepertinya berpotensi konsisten menggunakan strategi yang agresif untuk menjaga stabilitas kedaulatan. Tentunya hal ini bisa melalui bilateral dan multilateral serta dengan berkolaborasi dengan sejumlah organisasi internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan diam dan bisa saja akan memaknai middle power dengan gaya Prabowo yang berasal dari pengalaman militer. Oleh sebab itulah kombinasi dan modifikasi yang dilakukan Prabowo akan menentukan arah kedaulatan Indonesia. Sebab jika melacak jejak Prabowo selama ini selalu konsisten menyatakan kedaulatan Indonesia harga mati dan selalu menjadi patriot untuk menjaga nasionalisme dan potensi

ancaman dari negara manapun. Makanya Prabowo selalu berupaya menjalin hubungan strategis dengan negara manapun agar terjadi keseimbangan kekuatan dan kekuasaan. Sebab sesuai amanat konstitusi Indonesia juga memiliki tugas menjaga perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Adam, R. (2019, September 18). Asal mula teori animisme dan masalahnya. Yogyakarta: Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Bist, M. (2020). Kautilya's Arthasastra philosophy of strategy. New York: Routledge.
- Buzan, B., & Acharya, A. (2010). NonWestern international relations theory: Perspectives on and beyond. Abingdon: Routledge.
- Carlnaes, W. (2013). Handbook hubungan internasional. Bandung: Nusamedia.
- Dellios, R. (2003). Mandala: From sacred origin to sovereign affair in traditional Southeast Asia. CEWCES Research Paper, Paper 8. Queensland: Bond University.
- Effendi, Y. (2019). Finding new regional mandalas: Indonesia maritime strategy between. Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2(2), 133–150.
- Fathun, L. M. (2016). Kebijakan geopolitik poros maritim di era Jokowi. MIHI UMY.
- Fathun, L. M. (2016). Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok Terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2(2), 183-202
- Fathun, L. M., & Gideon, A. S. (2023). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia; Kerangka teori, model dan studi kasus. Jakarta: Graha Ilmu.
- Fathun, L. M., & Isnarti, R. (Eds.). (2021). Tinjauan multiperspektif kawasan Indo-Pasifik: Peluang dan tantangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fathun, L. M., & Komeini, Y. (Eds.). (2018). Indonesia dan keamanan

- kontemporer di Asia Tenggara. Jakarta: Suluh Media.
- Hudson, V. M. (2008). The history and evolution of foreign policy analysis. In S. Smith, A. Hadfield, & T. Dunne (Eds.), *Foreign policy: Theories, actors, cases* (pp. xxx–xxx). London: Oxford University Press.
- Mishra, S. (2012). Kautilya's Mandala theory. *Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 145–148.
- Morin, J. F., & Paquin, J. (2018). *Foreign policy analysis: A toolbox*. London: Palgrave Macmillan.
- Panduwinata, F., & Dewi, P. (2018). Analisis kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia. *CSIS Working Paper Series*, 1–40.
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021, 20 Juni). Strategi Indonesia mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) untuk menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 26(1). Universitas Tanjungpura.
- Rajeev. (2011). Inter state relations in Kautilyan Arthashastra. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 2(2), 1–4.
- Rosenau, J. (1971). *The scientific study of foreign policy*. New York: Free Press.
- Shahi, D. (2019). *Kautilya and nonWestern IR theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Shekhar, V. (2018). *Indonesian foreign policy and grand strategy in the twenty first century: Rise of an Indo Pacific power*. New York: Routledge.
- Warsito, T. (1998). *Teori teori politik luar negeri, relevansi dan keterbatasannya*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Yahya, A. F. (1996). *Refleksi paham*. Jakarta: Gramedia.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.